

Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina

Anna Zakiah Derajat¹, Toni Kurniawan²

¹Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
naazzakiey@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
toniwe605@gmail.com

ABSTRAK

Normalisasi hubungan Israel dan Arab pada dekade saat ini menjadi salah satu penghambat dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tahun 2020, Donald Trump telah memediasi empat negara Arab untuk menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel. Di balik kesepakatan ini, terdapat berbagai kepentingan negara-negara Arab terkait, Israel, dan AS di wilayah Timur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana normalisasi hubungan Israel dan negara Arab di bawah pemerintahan Trump dan dampaknya terhadap isu di wilayah Timur Tengah, serta perjuangan kemerdekaan Palestina dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis data, normalisasi hubungan Israel dan negara Arab dilakukan berdasarkan unsur identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), maksud (*intention*), dan nilai-nilai (*values*), sehingga AS dianggap memainkan Israel sebagai alat politiknya di Timur Tengah.

Kata kunci: Konstruktivisme, normalisasi hubungan, kemerdekaan palestina, kebijakan politik Donald Trump, kepentingan Pilpres AS 2020.

ABSTRACT

The normalization of relations between Israel and Arabs in the current decade is one of the obstacles in the struggle for Palestinian independence. In 2020, Donald Trump has mediated between four Arab countries to agree on normalizing relations with Israel. Behind this agreement, there are various interests of related Arab countries, Israel and the US in the Middle East region. This study aims to explain how the normalization of relations between Israel and the Arab state under the Trump administration and its impact on issues in the Middle East region, as well as the struggle for Palestinian independence using a constructivist perspective. The research method used is qualitative research with a literature study approach. Based on the results of data analysis, the normalization of relations between Israel and the Arab state is carried out based on elements of identity, interest, intention, and values, so that the US is considered to play Israel as a political tool in the Middle East.

Keywords: Constructivist, Normalization of relationships, Palestinian independence, Donald Trump's political policies, The interest of the 2020 United States presidential election.

Pendahuluan

Istilah normalisasi menjadi perbincangan yang cukup sering dibahas di dalam ranah politik internasional saat ini. Dalam sejarah, kata *normalize* ini dideskripsikan sebagai "*a return to normalcy*," istilah ini muncul sejak tahun 1800 dalam bidang ilmu kesehatan.¹ Namun, sampai hari ini, istilah normalisasi terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan sampai pada ranah politik internasional yang dijadikan sebuah konsep dalam hubungan diplomatik suatu negara.

Mengutip pemikiran Bartson, normalisasi bisa diartikan sebagai suatu proses dalam mewujudkan kesepakatan bersama, hal ini bertujuan untuk mengakhiri suatu konflik dengan beberapa

¹ Gadi Hitman and Chen Kertcher, "The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict," *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies* 2 (2018), <https://doi.org/10.26351/JIMES2-13>.

kesepakatan yang disepakati bersama, seperti adanya gencatan senjata, perjanjian damai antara kedua belah pihak, atau dengan membangun hubungan diplomatik.² Barston juga berpendapat bahwa:

*"Normalization is seen as a method involving; the popularity of the requirement for live to scale back tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution – whole or part – of major sources of dispute or tension."*³

Normalisasi hubungan Israel dan beberapa negara Arab bukan hanya terjadi pada abad ini saja. Jika diruntut dari sejarahnya, Negara Israel telah melakukan normalisasi dengan dua negara—Mesir dan Yordania, sejak keduanya terlibat perang dengan Israel. Pada tahun 1948, Mesir dan Israel terlibat dalam Perang Arab-Israel. Tahun 1973, dua negara ini juga terlibat dalam Perang Yom Kippur. Sampai pada akhirnya, Mesir dan Israel memutuskan untuk berdamai dengan menyepakati Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel pada tahun 1979. Setahun sebelumnya, tepat pada tahun 1978, Israel dan Mesir pun menyepakati Perjanjian Camp David yang dimediasi oleh Presiden AS Jimmy Carter.

Selain Mesir, Yordania pun menjalin normalisasi hubungan dengan Israel sejak negara ini terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1967 atau yang lebih dikenal dengan istilah Perang Enam Hari. Setelah adanya keterlibatan Yordania dalam Perang Enam Hari, kedua negara ini menyepakati hubungan dengan lahirnya perjanjian damai Israel-Yordania pada tahun 1994. Perjanjian damai itu secara resmi menjadi akhir dari perjalanan peperangan antara Yordania-Israel yang sudah terjadi sejak tahun 1948.

Pada abad ini, kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab pun telah terjadi. Di antaranya adalah kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan Negara Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko. Kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Israel ditandatangani pada 13 Agustus 2020. Sedangkan, kesepakatan normalisasi Bahrain-Israel ditandatangani pada 11 September 2020. Adanya kesepakatan dua negara ini dengan Israel tentu saja menuai kecaman keras dari Palestina, yang dianggap sebagai suatu pengkhianatan terhadap perjuangan negara-negara Arab untuk memerdekakan Palestina selama ini.⁴

Kecaman keras juga datang dari Iran dan Turki. Kedua negara ini mengecam normalisasi hubungan UEA-Bahrain dengan Israel. Menurut Iran dan Turki, adanya kesepakatan ini merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina yang mengalami pendudukan beberapa abad oleh Zionis Israel. Turki berpandangan bahwa UEA sendiri sedang memperjuangkan ambisi rahasia negaranya. Bagi Turki, negara-negara Arab pun telah lalai dan mengabaikan perjuangan Palestina.⁵

Normalisasi hubungan yang dijalin oleh UEA, Bahrain, dan Maroko dengan Israel tidak lepas dari adanya politik normalisasi Amerika Serikat (AS). Politik normalisasi AS ini menjadi awal masuknya politik dan hegemoni kepentingan AS di wilayah Timur Tengah. Adanya kesepakatan normalisasi hubungan Israel dan negara Arab berkaitan erat dengan kepentingan AS, khususnya Presiden Donald Trump. Kehadiran Trump dalam pengumuman kesepakatan normalisasi hubungan UEA-Bahrain dengan Israel tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan Trump menjelang pemilihan presiden AS. Trump yang masih menginginkan jabatan presiden tersebut, sedang mengumpulkan banyak suara dari masyarakat AS, khususnya yang mendukung kebijakannya di wilayah Timur Tengah. Adanya kesepakatan ini tentu akan mengangkat popularitas Trump, sehingga menarik simpati dari berbagai kalangan, khususnya dari komunitas Yahudi yang berada di AS.

² R.P. Barston, *Modern Diplomacy* (London and New York: Routledge, 2013), 52.

³ R.P. Barston, 275.

⁴ Simela Victoe Muhammad, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina," *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 17 (September 2020): 7–12.

⁵ Koran Tempo, "Iran Dan Turki Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel," Agustus 2020, <https://koran.tempo.co/read/internasional/456828/iran-dan-turki-kecam-normalisasi-hubungan-uea-israel>.

Hal ini tentu saja menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengapa normalisasi hubungan UEA-Bahrain dengan Israel dapat disepakati pada abad ini yang kemudian akan peneliti kaitkan dengan konteks Israel-Palestina. Karena dengan adanya normalisasi hubungan ini, tentu akan mempersulit Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari pendudukan Israel. Kajian ini penting untuk dibahas karena menyangkut tentang bagaimana prospek stabilitas keamanan wilayah Timur Tengah dan global, yang tentunya dikorelasikan dengan kepentingan masyarakat Palestina yang mengalami pengasingan dan pendudukan.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, perspektif konstruktivisme yang dipilih oleh peneliti, karena perspektif ini memiliki gagasan yang relevan bagi studi hubungan internasional, yaitu *pertama*, adanya keyakinan bahwa struktur yang dibangun oleh manusia dapat ditentukan oleh gagasan yang diyakini bersama dibandingkan dengan kekuatan material. *Kedua*, adanya kepercayaan, yaitu suatu identitas dan kepentingan yang melibatkan aktor-aktor negara, tidak hanya semata-mata ditentukan oleh motif, alasan, dan kepentingan mereka sendiri. Tetapi, berdasarkan pada interaksi yang dibentuk individu dengan berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.⁶

Ditulis dalam buku Barry Buzan dan Lene Hansen yang berjudul *The Evolution of International Security Studies* bahwa konstruktivisme merupakan bagian dari *critical theory* yang dapat menjelaskan tentang tindakan maupun keputusan yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah masa lampau. Konstruktivisme berfokus pada ide, norma, identitas, serta hal-hal lain terkait non-material.⁷ Friedrich Kratochwil berpendapat bahwa konstruksi hidup dalam dunia internasional merupakan sebuah proses dari interaksi yang terjalin antar subjek dan dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu unsur kepentingan (*interest*), identitas (*identity*), maksud (*intention*), dan nilai-nilai (*Values*), yang dapat menganggap subjek lainnya ditetapkan sebagai kawan atau malah berbalik menjadi lawan.⁸

Kesepakatan normalisasi hubungan negara Arab dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti memilih perspektif konstruktivisme sebagai alat yang paling relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam unsur identitas (*identity*), AS memiliki kepentingan untuk menjadi mediator kesepakatan normalisasi hubungan ini, karena AS khususnya Donald Trump sebagai presiden memiliki tujuan untuk menaikkan kembali popularitasnya di wilayah AS atas kebijakan yang telah dibuat. Unsur kepentingan (*interest*) menjawab persoalan kepentingan AS dan negara-negara Arab yang melakukan normalisasi demi mencapai kepentingan negaranya sendiri, seperti mempertahankan hegemoni, menjaga keamanan, dan perekonomian.

Kemudian, unsur maksud (*intention*) menjawab persoalan tentang hubungan politik mutualisme antara AS dan Israel dengan maksud yang sama yaitu untuk saling menguntungkan satu sama lain dalam bidang politik dan ekonomi. Dan unsur nilai (*values*), menjawab persoalan nasib Palestina dibalik kesepakatan normalisasi hubungan Arab-Israel yang dianggap tidak lagi menjadi prioritas dan tanggung jawab dari negara-negara Arab.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang paling cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut karena adanya keselarasan dengan tujuan penelitian, yaitu peneliti mencoba menjelaskan terkait dampak normalisasi hubungan Israel dan negara

⁶Sugiarto Pramono Purwono, "Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional" 7, no. 2 (2010): 14.

⁷ Barry Buzan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies* (New York: Cambridge University Press, 2009), 194.

⁸ Friedrich Kratochwil, *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 20–23.

Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan hegemoni kepentingan AS di wilayah Timur Tengah dalam perspektif konstruktivisme. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sosial.

Dalam metode ini, peneliti akan menajamkan analisa dari permasalahan yang dipaparkan, sehingga mampu menemukan satu kesimpulan yang rinci. Penelitian ini juga dibatasi pada dampak-dampak yang diterima oleh Palestina sebagai negara pendudukan Israel serta kepentingan AS dalam memediasi normalisasi hubungan Israel dengan negara Arab dengan menggunakan perspektif konstruktivisme.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih data tidak langsung sebagai penunjang. Data-data tersebut diambil dari berbagai studi literatur yang dianggap relevan dengan poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga jenis data tersebut merupakan data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel jurnal, buku, dan surat kabar *online* yang dianggap kredibel dan memiliki korelasi dengan objek penelitian.

Artikel-artikel jurnal yang digunakan peneliti sebagai sumber data merupakan artikel yang berkaitan dengan tema konflik Israel-Palestina, normalisasi hubungan UEA-Israel dan isu Palestina, strategi Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan, Palestina-Israel dalam sejarah, konflik, dan masa depan, pemetaan konflik Timur Tengah, dan fakta perjanjian damai serta hubungan diplomatik negara Timur Tengah dalam proses perdamaian konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina.

Adapun buku-buku yang digunakan oleh peneliti merupakan buku yang memiliki kesamaan dan relevan dengan tema penelitian ini. Buku-buku tersebut bertema *modern diplomacy*, hubungan internasional perspektif dan tema, zionisme: gerakan menaklukan dunia, gejolak politik Timur Tengah, *understanding international relations*, dan sejarah Palestina.

Sumber data yang lain adalah surat kabar *online*. Alasan peneliti menggunakan sumber ini karena surat kabar *online* yang dianggap kredibel cukup *up to date* dalam mengangkat dan mengkaji permasalahan internasional, khususnya wilayah Timur Tengah. Pemilihan surat kabar ini secara acak, di mana peneliti berpatok pada tema-tema yang memuat berita tentang normalisasi hubungan Israel dan negara Arab, kepentingan AS di wilayah Timur Tengah, konflik Israel-Palestina, dan isu sejenisnya yang masih terkait. Surat kabar *online* yang digunakan berasal dari dalam dan luar negeri.

Analisis

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana konstruktivisme AS dan Israel dalam melakukan aksi politik untuk mendapatkan dukungan dari beberapa negara Arab, yang diikat dalam bentuk kerja sama atau disebut dengan normalisasi hubungan Arab-Israel pada abad ini.

Faktor-Faktor Terjadinya Kesepakatan Normalisasi Hubungan Arab-Israel

Normalisasi hubungan Arab dan Israel tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor di dalamnya. Faktor-faktor tersebut memiliki perbedaan di antara satu negara dengan negara lain. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan tentang faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel sejak dahulu hingga saat ini.

a. Mesir

Pembicaraan mengenai konflik Arab-Israel memang tidak menemukan kesepakatan damai hingga saat ini. Namun, hal itu tidak diberlakukan untuk Negara Mesir, di mana saat Mesir menunjuk Anwar Sadat sebagai presidennya, lambat laun Negara Mesir pun menjadi sekutu dan mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Setelah dilantiknya Anwar Sadat pada tanggal 15 Oktober 1970 menjadi Presiden Republik Mesir yang baru, ia memiliki pemikiran untuk mengubah Mesir menjadi lebih realistis. Menurutnya, jika Mesir ingin mengalami perubahan yang lebih baik di bidang militer dan politik, maka Mesir harus mendekati kepada Amerika Serikat ataupun Arab Saudi, karena dua

negara itu dianggap menjadi kunci dan solusi untuk terciptanya perubahan di Mesir.⁹ Normalisasi hubungan Mesir dan Israel yang dipikirkan oleh Anwar Sadat hanya ia kemukakan kepada Dr. Mahmoud Fawzi, yaitu:

"Mesir sepakat untuk berdamai dengan Israel. Mesir juga akan memberikan semua jaminan yang diinginkan Israel, hal ini dilakukan untuk menghentikan semua persoalan yang sedang mengguncang dunia, dan menjadi erat kaitannya dengan kepentingan kedua kekuatan besar."¹⁰

Ungkapan tersebut menuai pro dan kontra, tetapi pihak Amerika Serikat dan Israel menyambut baik hal tersebut. Menindak lanjuti konflik Arab-Israel, Anwar Sadat memilih untuk mengunjungi Israel di kantor parlemennya. Pada tanggal 5 September 1978, perjanjian damai Mesir-Israel pun terjadi. Perjanjian ini dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Jimmy Carter di Camp David. Sehingga, perjanjian ini dinamakan dengan Perjanjian Camp David. Dengan adanya perjanjian damai antara Mesir-Israel, Perdana Menteri Israel, yaitu Menachen Begin mengatakan bahwa telah terjadi pengembalian wilayah Semenanjung Sinai kepada Mesir yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967.¹¹ Selain itu, rakyat Mesir juga tidak memiliki ketakutan untuk kehilangan keluarganya dalam peperangan, serta Terusan Suez dapat dibuka kembali dan diperlebar, serta menjadi bagian dari sumber valuta asing yang ditaksir sekitar US\$ 1000 juta per tahun.¹²

Pada tahun 2020, Israel mulai menormalisasi hubungannya dengan empat negara Arab, yang disebut sebagai Perjanjian Abraham (*Abraham Accord*). Kesepakatan itu ditanggapi dengan skeptis dan kritik sengit. Argumen kritik yang paling banyak didengar adalah bahwa normalisasi akan memperburuk konflik Israel-Palestina, karena kemajuan dalam masalah itu tidak lagi menjadi prasyarat untuk normalisasi hubungan dengan sebagian besar negara-negara Arab sebagaimana diatur dalam Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002.¹³ Perjanjian Abraham juga tampaknya memiliki efek yang cukup signifikan di Mesir sebagai negara Arab yang pertama kali menjalin hubungan normalisasi dengan Israel beberapa tahun lalu. Sementara, hubungan ini sering dicirikan sebagai "Perdamaian Dingin (*Cold Peace*)."¹⁴

Perjanjian Abraham pada tahun 2020 dinilai sebagai suatu langkah untuk membuktikan adanya tahapan baru dari hubungan normalisasi Mesir dan Israel. Setelah pertemuan bilateral dengan Blinken pada 27 Maret 2022, tepat sebelum KTT Negev, Bennett berbicara tentang peremajaan ulang perdamaian lama dengan menggunakan energi baru dari Perjanjian Abraham. Hal ini terutama berlaku untuk Mesir, yang memiliki kepentingan untuk menjadi bagian dari kerja sama ekonomi antara Israel dan UEA, serta berpikiran sama mengenai penahanan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Sebaliknya, Israel dan UEA memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di Mesir mengingat negara itu mendapat tekanan tambahan dari energi tinggi dan harga gandum yang disebabkan oleh perang Rusia di Ukraina.¹⁵

Pada pertemuan trilateral 21 Maret 2022 di Sharm el-Sheikh, diduga ada pembicaraan tentang zona perdagangan bebas. Israel ingin menghidupkan kembali hubungan dengan Mesir dan memperkenalkan komite pengarah bilateral yang bersangkutan pautan dengan Bahrain, Maroko, dan

⁹ John L. Esposito John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek* (Bandung: Mizan, 1999), 238.

¹⁰ Anwar Sadat, *Mencari Identitas* (Jakarta: Tira Pustaka Jakarta, 1983), 380.

¹¹ David Naveh Paul Hare, "Group Development At Camp David Summit," *Journal Small Group Research* 15, no. 3 (Agustus 1984): 299.

¹² Kirdi Dipoyudo, "Mesir Sesudah Presiden Anwar Sadat," *Jurnal Analisa: Aktualitas Internasional* 4, no. 9 (1982): 380.

¹³ Petra Dachtler, "From New to Normal: Two Years after the Abraham Accords," no. 5 (2022), <https://doi.org/10.57671/GFME-22052>.

¹⁴ Russell E. Lucas, "Jordan: The Death of Normalization with Israel," *Middle East Journal* 58, no. 1 (2004): 94.

¹⁵ Dachtler, "From New to Normal."

UEA. Hal ini bertujuan untuk menangani berbagai topik, termasuk meningkatkan kerja sama pariwisata dan energi. Diplomasi kunjungan yang intensif sejak tahun 2021 juga menggarisbawahi kualitas hubungan yang baru.¹⁶

b. Yordania

Konflik antar negara-negara Arab dan Israel memang memiliki sejarah panjang, salah satunya konflik Yordania dan Israel. Yordania merupakan salah satu negara yang memiliki peranan penting dalam Perang Arab-Israel tahun 1948, bersama empat negara lainnya seperti Irak, Lebanon, Suriah, dan Mesir. Pada peperangan tersebut, Yordania memiliki fungsi untuk menjaga tempat-tempat suci yang berada di Yerusalem dan melawan invasi Yahudi.¹⁷

Pada tahun 1967, Yordania kembali ikut terlibat dalam Perang Enam Hari bersama Suriah dan Mesir. Perang ini terjadi akibat dari pembagian pengairan Sungai Yordania, di mana Negara Israel memiliki rencana untuk mengalihkan perairan tersebut menuju Gurun Naqab. Hubungan Yordania-Israel dianggap tidak baik, namun pada tahun 1994, Yordania memilih untuk menyepakati perjanjian damai dengan Israel yang lebih dikenal dengan istilah *Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan*.¹⁸ Perjanjian antara dua negara ini disepakati pada tanggal 26 Oktober 1994 yang dihadiri oleh Raja Hussein dari Yordania, Perdana Menteri Yitzak Rabin dari Israel, dan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang dijadikan sebagai mediator dalam perjanjian damai ini.¹⁹

Adanya kesepakatan normalisasi hubungan Yordania-Israel ini, peneliti jabarkan setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakanginya, yaitu *pertama*, adanya rekonsiliasi ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa pasca kekalahan perang teluk, Yordania memang mengalami banyak kerugian yang diakibatkan oleh peperangan tersebut, sehingga mengalami krisis ekonomi serta banyaknya konflik regional yang memiliki dampak besar terhadap Negara Yordania. Untuk itu, dengan adanya perjanjian ini, Yordania dapat melakukan perjanjian untuk menarik investor ke negaranya.

Kedua, penegakkan demokrasi dan HAM. Paham demokrasi yang berasal dari Amerika Serikat ini menjadi tren paham yang diterapkan di wilayah Yordania. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakannya terhadap dunia Barat, khususnya Amerika Serikat. *Ketiga*, perdamaian Israel-Palestina yang berdampak pada keamanan Yordania. Hal ini karena Yordania sendiri memang berbatasan dengan kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Untuk itu, demi terciptanya kamanan, maka Yordania ingin turut andil dalam kesepakatan damai Israel-Palestina dengan menyetujui perjanjian damai Yordania-Israel ini.

Adanya Perjanjian Abraham pada tahun 2020, tidak cukup memberikan efek signifikan pada hubungan Yordania dan Israel. Selain perjanjian trilateral untuk menukar tenaga surya Yordania dengan air Israel yang difasilitasi oleh perusahaan UEA, posisi Yordania lebih kompleks mengingat komposisi penduduknya sendiri, hubungan dekatnya dengan Otoritas Palestina, dan peran khusus sebagai penjaga tempat-tempat suci Yerusalem—Temple Mount/Haram al-Sharif. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Ayman Safadi tidak ikut serta dalam Negev Summit, ia malah menemani Raja Yordania dalam kunjungannya ke Ramallah.²⁰

c. Uni Emirat Arab (UEA)

¹⁶Amr Yossef, “The Regional Impact of the Abraham Accords” (West Point, New York: Modern War Institute, 2021).

¹⁷The Hashemite Kingdom of Jordan, “The Disaster of 1967,” n.d., http://www.kinghussein.gov.jo/his_periods3.html.

¹⁸Lucas, “Jordan: The Death of Normalization with Israel,” 94.

¹⁹Lucas, 95.

²⁰Muriel Asseburg and Sarah Charlotte Henkel, “Normalisation and Realignment in the Middle East,” Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 2021, <https://www.swp-berlin.org/en/publication/normalisation-and-realignment-in-the-middle-east>.

Kesepakatan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel merupakan sebuah hasil dari pembicaraan rahasia yang sudah dijalin dalam beberapa dekade terakhir. Uni Emirat Arab merupakan negara ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, setelah Negara Mesir dan Yordania pada beberapa dekade lalu. Perjanjian damai yang disepakati kedua belah pihak ini disebut sebagai Perjanjian Abraham. Perjanjian ini diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dimediasi langsung oleh Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Dalam hal ini, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Perjanjian Abraham dikarenakan oleh minat UEA dalam hubungan dagang di bidang teknologi dengan Israel. Apex Group – perusahaan UEA – telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan Israel. Dalam hal normalisasi ini, fokus UEA dan Israel berkaitan pada bidang perjalanan, perdagangan, bisnis, dan Perjanjian Abraham ini juga telah melangkah jauh dari perdamaian dingin Mesir dan Yordania pada beberapa dekade lalu.²¹

Bukan hanya itu, Israel pun sudah memiliki impian besar untuk dapat terjun langsung dalam dunia pasar Arab Terul yang dikenal sebagai pasar terbesar dan terkuat di dunia. Hal ini tentu saja hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan nasional kedua negara, bukan untuk memudahkan pemecahan konflik negara-negara Arab dan Israel, khususnya pada konflik Israel-Palestina. Dan faktor ekonomilah yang menjadi faktor terbesar yang menentukan adanya kesepakatan hubungan normalisasi UEA-Israel ini.

d. **Bahrain**

Bahrain merupakan negara keempat yang memutuskan diri untuk menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Perjanjian ini ditandatangani pada 11 September 2020 di Gedung Putih.²² Faktor yang menjadikan adanya perjanjian damai ini karena untuk memperkuat pengaruh Negara Bahrain dalam melawan kelompok oposisi di wilayah Bahrain sendiri.

Adanya kesepakatan hubungan normalisasi ini menjadikan Bahrain memiliki potensi untuk memperkuat barisan dalam menaklukkan pemberontakan, upaya menuju kemerdekaan, serta upaya-upaya demokrasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok.²³ Bukan hanya itu, Bahrain juga mendapatkan kesempatan untuk memasukkan perdagangan senjata yang menjadi faktor utama dalam kesepakatan normalisasi hubungan ini.

e. **Maroko**

Normalisasi hubungan Maroko-Israel telah disepakati pada tanggal 10 Desember 2020 yang dimediasi oleh Donald Trump yang masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Adanya kesepakatan damai ini menjadi bumerang untuk Maroko, karena dianggap sebagai pengkhianat Islam dan perjuangan Palestina. Kesepakatan normalisasi hubungan ini tentu saja demi kepentingan Negara Maroko, di mana sebagai kompensasi atas normalisasi tersebut, AS bersedia untuk mengakui kedaulatan Negara Maroko atas wilayah Sahara Barat.

Dalam sejarah, tercatat bahwa sebelum datangnya Bangsa Eropa ke Afrika, Negara Maroko dan Sahara Barat merupakan satu kesatuan yang bernaung pada Kerajaan Maroko. Pada saat itu, Kerajaan Maroko menandatangani perjanjian dengan Inggris dan Spanyol. Sedangkan, pihak Negara Inggris dan Prancis juga telah menyepakati suatu perjanjian yang di dalamnya mengakui Kerajaan Maroko sebagai bagian resmi kerajaan, dan tercipta wewenang untuk Prancis agar dapat mengurus

²¹Massimiliano Fiore, "The Abraham Accords and the Palestinian Issue," *E-International Relations*, n.d., <https://www.e-ir.info/2020/11/01/the-abraham-accords-and-the-palestinian-issue/>.

²²CNN Indonesia, "Kronologi Normalisasi Hubungan UEA, Bahrain Dan Israel," September 16, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916085105-120-547021/kronologi-normalisasi-hubungan-uea-bahrain-dan-israel>.

²³Tempo, "Normalisasi Dengan Israel Untungkan Bahrain Dalam Konflik Internal," September 14, 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1385985/normalisasi-dengan-israel-untungkan-bahrain-dalam-konflik-internal>.

wilayah tersebut.²⁴ Namun, karena adanya konflik antara Prancis dan Spanyol, maka kedua negara ini membagi daerah kekuasaan. Perancis menguasai Maroko Utara dan Spanyol menguasai Maroko Selatan yang kemudian disahkan menjadi Sahara Barat.

Pada tahun 1956, Maroko bagian Utara pun mendeklarasikan kemerdekaannya dan berganti nama menjadi Maroko. Sejak saat itu, Maroko memulai perjuangannya untuk mengembalikan wilayah yang dikuasai oleh Spanyol. Namun disisi lain, penduduk Sahara Barat membentuk sebuah gerakan untuk memerdekakan wilayah penjajahan Spanyol tersebut menjadi negara yang berdaulat. Gerakan itu dinamakan dengan Front Polisario.

Maka dari itu, dengan adanya kesepakatan normalisasi hubungan Negara Maroko dan Israel, Amerika Serikat akan mengembalikan wilayah Sahara Barat sebagai wilayah Maroko. Selain itu, dengan adanya hubungan normalisasi ini juga, pemerintahan Presiden Donald Trump sedang memproses persetujuan kontrak dalam penjualan senjata canggih milik AS senilai US\$ 1 miliar atau senilai dengan 14 triliun ke Maroko. Hal ini diumumkan satu hari setelah kesepakatan normalisasi tersebut diumumkan.²⁵

f. Sudan

Tepat pada tanggal 23 Oktober 2020, Sudan menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan ini resmi diumumkan oleh Presiden Donald Trump dari Gedung Putih. Adanya normalisasi ini memberikan keuntungan untuk Sudan karena telah dikeluarkannya keputusan Presiden Donald Trump yang akan menghapus Sudan dari daftar negara yang mendukung kelompok terorisme.

Isu terorisme merupakan isu yang paling diangkat dan disadari oleh Amerika Serikat yang memang selalu mengkampanyekan anti terorisme. Deklarasi *Global War on Terror* diberlakukan pertama kali pada pemerintahan Presiden George W. Bush. Adanya kebijakan luar negeri AS ini dikarenakan oleh tantangan AS untuk memerangi aksi terorisme global yang ada sejak tahun 2001.²⁶

Sebetulnya, adanya kampanye anti terorisme ini bisa dianggap lebih menekankan pada sebuah usaha militer yang dijadikan sebagai ideologi dari ketakutan-ketakutan dan sebuah represi yang mempengaruhi lebih banyaknya permusuhan, meningkatnya kekerasan, dibandingkan dengan usaha dalam mencegah aksi teror dan penguatan keamanan.²⁷

Washington telah memasukkan Sudan ke dalam daftar negara penyokong teroris sejak tahun 1993. Pada tahun tersebut, pimpinan Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden menjadi tamu pemerintah dan bertempat tinggal di negara tersebut. Dalam normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel ini, para pembantu Trump mulai menekan Negara Sudan untuk dapat mengambil keputusan dan langkah-langkah kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan terbentuknya keputusan Donald Trump yang telah menyepakati untuk mengeluarkan Sudan dari daftar nama negara penyokong terorisme menjadi salah satu keuntungan dan faktor terbesar Sudan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Selain itu, faktor ekonomi yang menjadikan Sudan memilih untuk menyepakati normalisasi hubungan, karena perekonomian Sudan dianggap telah carut-marut, angka inflasi dianggap tinggi, hutang negara telah menumpuk. Hal ini disebabkan oleh embargo Amerika Serikat, serta adanya pemisahan wilayah Sudan Selatan yang memiliki kekayaan minyak.

²⁴ Sri Khairunnisa Ariyati, "Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat Dan Upaya Resolusi Konflik," *Jurnal Verity-UPH Journal of International Relations* 11, no. 22 (July 2019): 32.

²⁵ Republika, "Pemerintahan Trump Siap Jual Senjata Canggih AS Senilai Rp 14 Triliun Ke Maroko," 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1413777/pemerintahan-trump-siap-jual-senjata-canggih-as-senilai-rp-14-triliun-ke-maroko>.

²⁶ Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, "Pengaruh Serangan 9/11 Terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional," *Journal Andalas: Journal of International Studies* 5, no. 1 (2006): 29.

²⁷ Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, 31.

Kepentingan AS Terhadap Normalisasi Arab-Israel

Terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel sangat berkaitan erat dengan kepentingan AS, khususnya Donald Trump yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden AS, selain adanya kepentingan negara-negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kehadiran Trump secara langsung dan menjadi mediator dalam kesepakatan normalisasi hubungan Arab-Israel ini, tidak dapat dilepaskan dengan adanya kepentingan dari Trump dalam menghadapi pemilihan Presiden AS pada November 2020 lalu.

Peneliti telaah, adanya keikutsertaan Trump dalam hal ini dikarenakan ia sedang berusaha untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat AS dengan memiliki gebrakan baru dalam kebijakannya di wilayah Timur Tengah. Dukungan suara memang sangat dibutuhkan oleh Trump, karena Trump sendiri sedang menaikkan popularitasnya yang semakin surut di Amerika Serikat. Kesurutan popularitas Trump diakibatkan oleh adanya kebijakan yang tidak efektif saat penanganan pandemi global, yaitu COVID-19 dan mulai meluasnya demonstrasi yang berkaitan dengan rasisme. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan politik identitas Trump yang melahirkan tindakan politik dengan banyaknya upaya untuk memberikan saluran aspirasi dalam hal mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas nilai-nilai yang dipandang sebagai sesuatu yang penting, yakni terbentuknya penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan.²⁸

Selain itu, keikutsertaan AS dalam kesepakatan ini pun tidak terlepas dari kebijakannya di Timur Tengah yang lebih memihak kepada Israel dan melahirkan kerugian bagi pihak Palestina. Hal ini dapat dibuktikan dalam isu klaim sepihak AS terhadap Yerusalem yang dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Israel. Klaim sepihak AS dan pemindahan Kedubes AS ke Kota Yerusalem melahirkan dua unsur identitas yang berkaitan dengan isu ideologi, yaitu Islam dan Yahudi. Adanya kecurigaan dan ketakutan berlebih yang ditunjukkan oleh Trump dalam kebijakannya, menjadikan Trump menganggap bahwa Islam sebagai sebuah ancaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan yang Trump keluarkan sejak awal pemerintahannya, yaitu dengan adanya kebijakan baru mengenai keimigrasian, dengan dalih untuk menjaga keamanan AS dari serangan-serangan terorisme. Padahal, isu terorisme tidak bisa dengan mudah dikaitkan dengan agama, karena sampai saat ini pun belum adanya kesepakatan tentang hal tersebut.²⁹

Dalam hal ini, analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan unsur identitas (*identity*) yang berkaitan dengan adanya maksud Donald Trump dalam upaya pengumpulan suara masyarakat AS terhadap kebijakannya di wilayah Timur Tengah, serta adanya keberpihakan Trump pada kaum Yahudi di kawasan Israel. Yang dibuktikan dengan adanya klaim sepihak AS terhadap Kota Yerusalem dan pemindahan Kedubes AS ke kota tersebut. Tentu saja, ini tidak terlepas dari alasan Trump yang memiliki kecurigaan besar terhadap Islam, serta mulai merebaknya kasus islamophobia di Amerika Serikat.

Strategi Politik AS-Israel

a. Lobi Internasional

Dalam isu normalisasi hubungan Arab-Israel ini tidak terlepas dari adanya lobi internasional. Aktivitas lobi ini tentu saja didasari oleh kebutuhan suatu negara untuk mencapai kepentingan kelompoknya melalui kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah yang sah. Kelompok lobi ini akan

²⁸ Juhana Nasrudin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik," *Jurnal Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018).

²⁹ Noam Chomsky, *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World* (London: Pluto Press, 2016).

melancarkan aksinya dalam melobi pemerintah baik secara sembunyi maupun terbuka terhadap publik.³⁰

Kelompok lobi Israel memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Beberapa kelompok lobi Israel, seperti *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), *Anti-Defamation League* (ADL), dan *Zionist Organization of America* (ZOA) merupakan kekuatan lobi terkuat di Amerika Serikat. Kelompok lobi Israel juga memainkan peran media untuk menggiring opini publik yang dijadikan sebagai alat lobi mereka.³¹

Adanya lobi AS dan Israel di wilayah Timur Tengah terkait normalisasi hubungan Israel dan negara Arab tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara itu sendiri. Sangatlah jelas bahwa kelompok lobi ini memiliki kepentingan untuk mencapai maksud politiknya. Israel mampu memainkan peran untuk mencapai kepentingan dengan menggunakan *power* AS. Karena secara *hard power*, AS memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam lingkup politik dan memiliki pengaruh besar di Dewan Keamanan PBB.³² Sedangkan AS, menjadikan Israel sebagai alat untuk dapat menjadi hegemoni kekuasaan di Timur Tengah dengan melancarkan aksinya sebagai mediator normalisasi hubungan Israel dan negara Arab.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Steve Mnuchin mengatakan bahwa pada abad ini AS dan Israel sedang membangun kerja sama yang erat untuk lebih menarik perhatian negara-negara Arab agar bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.³³ Kesepakatan yang dimediasi oleh AS untuk menormalisasikan hubungan Israel dan beberapa negara Arab bisa dijadikan modal untuk Presiden Donald Trump yang dapat dijual saat menghadapi Pilpres AS 2020. Tentu saja, hal inilah yang menjadikan alasan besar AS untuk turut melancarkan kepentingan politik Israel dan AS sendiri. Dalam hal ini, setidaknya ada dua unsur yang dapat dimasukkan dalam analisis perspektif konstruktivisme, yaitu unsur identitas (*identity*) dan unsur kepentingan (*interest*) AS, khususnya Trump dalam memainkan perannya di dalam isu normalisasi hubungan Israel ini.

b. Hubungan Persahabatan AS-Israel

Hubungan persahabatan Amerika Serikat (AS) dan Israel sudah terjalin sejak lama. Dukungan AS terhadap Israel diyakini sejak adanya Deklarasi Blackstone (*Blackstone Memorial*) yang diresmikan pada tahun 1891. Deklarasi ini merupakan sebuah petisi yang ditulis oleh William Blackstone Eugene dan ditandatangani oleh 431 warga terkemuka yang berada di Amerika Serikat.³⁴ Selain itu, pemerintahan AS juga memberikan dukungan atas lahirnya kesepakatan dari konferensi zionis internasional pada 11 Mei 1942 lalu, dengan keputusan untuk mengubah Palestina menjadi negara Yahudi dan mengusir orang-orang Arab di dalamnya.

Diruntut dari sejarah panjangnya, persahabatan AS-Israel dimulai dari proses pembentukan negara Israel sampai saat ini. Dukungan politik yang diberikan oleh AS tidak pernah surut, bahkan meskipun banyak isu yang memang bertentangan dengan paham demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), jika demi kepentingan Israel semua hal itu akan dianggap wajar dan dimaklumi. Isu yang

³⁰ Lovell, J.P, *Foreign Policy in Perspective* (Canada: Holt, Rinehart & Winston, 1970), 256–57.

³¹ Iqbal Ramadhan, “Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah,” *Journal Intermeistic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (Mei 2017): 155.

³² J. Mearsheimer S. Walt, *The Israel Lobby and U.S Foreign Policy* (New York: Farrar, Starus and Giroux, 2008), 162.

³³Republika, “AS Dan Israel Lobi Banyak Negara Arab Untuk Normalisasi,” Oktober 2020, <https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/qifyei377/as-dan-israel-lobi-banyak-negara-arab-untuk-normalisasi>.

³⁴ Rudi Candra, “PENGARUH IDENTITAS PERSAHABATAN AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL TERHADAP PENOLAKAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB,” April 2018, https://www.researchgate.net/publication/324770165_PENGARUH_IDENTITAS_PERSAHABATAN_AMERIKA_SERIKAT_DAN_ISRAEL_TERHADAP_PENOLAKAN_KEANGGOTAAN_PALESTINA_DI_PBB.

masih hangat dari hubungan persahabatan AS-Israel ini, dengan dikeluarkannya klaim sepihak oleh Presiden Donald Trump terkait pengakuan terhadap Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, serta pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari maksud AS untuk memiliki pengaruh lebih di wilayah Timur Tengah.

Adanya hubungan ini tidak terlepas dari politik mutualisme antara Israel dan AS. Dalam hal ini, peneliti akan menelaahnya dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politik. Jika peneliti lihat dari aspek ekonomi, Amerika Serikat memiliki keinginan besar untuk menguasai wilayah-wilayah Timur Tengah. Mengingat bahwa wilayah Timur Tengah ini menjadi kawasan yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia internasional. Maka dari itu, AS ingin memiliki pengaruh untuk dapat memperoleh keuntungan dari aspek ekonomi ini.

Kepemilikan minyak merupakan hal yang sangat penting bagi AS, karena kebutuhan negara satu ini terhadap minyak sangatlah besar. Hampir seluruh infrastruktur dalam bidang ekonomi AS masih tergantung dari ada atau tidaknya minyak bumi. Hal ini yang menjadikan AS sadar untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Israel. Israel merupakan negara yang dianggap dapat mewujudkan kepentingan AS di wilayah Timur Tengah. Bagi AS, Negara Israel merupakan alat untuk memperkeruh kondisi di Timur Tengah. AS sadar bahwa bersatunya negara-negara Arab di Timur Tengah merupakan bencana bagi AS dan Israel. Hal ini bisa dilihat saat negara-negara Arab bersatu pada perang Arab-Israel tahun 1974, yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kerugian atas embargo minyak di internasional. Maka dari itu, AS memainkan politik adu domba atau mencari taktik untuk memecah belah kawasan di Timur Tengah lewat Negara Israel.

Selain keuntungan dalam bidang ekonomi, AS juga memiliki keuntungan dalam bidang politik dari hasil persahabatan dengan Negara Israel tersebut, yaitu *pertama*, AS memiliki dukungan suara dan jabatan politik. Michael C. Hudson yang merupakan seorang Direktur Center Contemporary Arab Studies dari Georgetown University mengungkapkan bahwa ada dua aliran pemikiran yang terbentuk di kalangan intelektual dan politisi AS sendiri terhadap sikap AS dengan negara-negara Arab, khususnya Palestina. Ia menyebutkan aliran yang pertama merupakan sebuah aliran yang membela Israel atau biasa disebut dengan doktrin "*Israel-First*." Kemudian, aliran yang kedua merupakan aliran yang memang mendukung AS untuk bersikap netral dan adil di wilayah Timur Tengah atau bisa juga disebut sebagai aliran "*evenhanded*."³⁵ Kedua aliran tersebut dinilai berseberangan, sebab mayoritas rakyat AS dan politisi yang memangku kebijakan akan lebih condong terhadap doktrin *Israel-First*. Bahkan, bisa peneliti telaah dari sikap AS khususnya pemerintahan yang dijabat oleh Donald Trump, lebih memilih dan menganut paham tersebut, karena dirasa akan lebih menguntungkan. Hal ini bisa dilihat dari fenomena normalisasi hubungan Arab-Israel yang dimediasi oleh Donald Trump sendiri.

Kedua, AS mendapatkan simpati dan pengaruh besar dari adanya lobi zionis. Alasan AS sendiri dalam membela kepentingan Israel ini, dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan besar dari lobi zionis. Karena, terdapat banyak lembaga zionis AS yang sudah menguasai sekitar 250-300 suara yang menjadi anggota kongres. Selain itu, lembaga-lembaga zionis juga memiliki daya infiltrasi yang besar di berbagai lembaga pentingnya AS.

Ketiga, adanya perlindungan terhadap hegemoni Amerika. Seperti yang kita tahu bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet, AS menjadi negara *super power* yang tidak memiliki pesaing dan musuh yang dapat menandinginya. Dalam sebuah kekuasaan politik, tentu seringkali dibutuhkan seorang musuh dan sekutu untuk melindungi sebuah kekuasaan. Hal inilah yang terjadi antara Israel dan AS yang menjalin koalisi untuk mempertahankan, memperkokoh, serta melindungi hegemoni AS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

³⁵ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007), 324.

Dalam hubungan persahabatan ini, tentu saja bukan hanya AS yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga dari pihak Israel. Dalam bidang ekonomi, Israel memiliki keuntungan dari adanya bantuan AS terhadap negara ini. Semenjak berdirinya Negara Israel hingga akhir tahun 1991, pemerintahan AS sudah memberikan bantuan keuangan pada Israel sekitar kurang lebih 53 miliar dolar Amerika. Bukan hanya itu, Israel juga diberikan kemudahan oleh pihak AS dalam hal pembelian senjata dan kebutuhan militer.

Sedangkan, dalam bidang politik, beberapa kebijakan politik luar negeri AS dapat menguntungkan Israel, seperti adanya satu wilayah yang diperuntukkan untuk ditempati oleh bangsa Yahudi, adanya campur tangan AS dalam berbagai konflik Israel dan negara-negara Arab bertujuan untuk melindungi kepentingan Israel, dan kepemilikan AS atas hak veto di PBB ini mampu menggagalkan berbagai macam rencana resolusi yang dapat merugikan pihak Israel. Hal inilah yang menjadikan Israel dengan mudahnya bergerak dan melakukan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab yang memang didorong langsung oleh pihak pemerintahan Amerika Serikat.

Hubungan persahabatan ini juga memiliki maksud yang sama, yaitu mencari keuntungan dari politik mutualisme yang dijalin oleh kedua negara ini. Dari maksud tersebut, dapat dilihat jelas bahwa AS memiliki maksud untuk memperluas kekuasaan dan memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah dengan bantuan Israel sebagai "boneka politik" mereka. Selain itu, AS dan Israel juga ingin menunjukkan eksistensinya dengan tujuan untuk memperkuat hegemoni terhadap negara-negara lain, khususnya negara yang ada di wilayah Timur Tengah. Maka dari itu, atas dasar kesamaan maksud (*intention*) ini, menjadikan AS menganggap bahwa Israella yang pantas untuk dijadikan sekutunya, agar dapat membantu melancarkan kekuasaan ataupun mencegah ancaman yang datang dari dunia internasional.

Nasib Palestina di Balik Normalisasi Hubungan Arab-Israel

Konflik Israel-Palestina telah terjadi sejak beberapa abad lalu dan selalu kembali meningkat dengan berbagai faktor di dalamnya. Peningkatan konflik ini tentu saja menjadi perhatian dan keprihatinan dari berbagai pihak di dunia internasional. Sebab, dengan adanya konflik ini telah memakan banyak korban yang berjatuh, kerugian yang besar akibat pembongkaran yang dilakukan Israel di wilayah Palestina, dan lain sebagainya. Konflik ini juga dipicu oleh isu perebutan wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Kebrutalan pendudukan Israel dengan menerapkan aturan ketat yang membatasi gerak rakyat Palestina untuk tinggal di tanahnya sendiri merupakan salah satu pelanggaran HAM yang dianggap berat. Bagi rakyat Palestina sendiri, tindakan yang dilakukan Israel ini merupakan suatu pelanggaran kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan.

Selain itu, dengan adanya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel pun akan menjadi bumerang yang membahayakan bagi prospek perdamaian antara kedua negara ini. Kesepakatan normalisasi ini tentu saja difasilitasi langsung oleh Amerika Serikat, di mana dapat dipahami dan diambil sebuah kesimpulan bahwa permainan politik AS ini dapat mengalihkan isu kemerdekaan Palestina yang telah diperjuangkan sejak dulu.

Tatanan dunia Arab dalam konflik Arab-Israel ini tentu masih mengacu kepada Perjanjian Damai Arab tahun 2002, digagas oleh Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud sebagai Raja Arab Saudi. Dalam hal ini, dunia Arab menegaskan bahwa akan menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel tetapi jika didasarkan pada perjanjian untuk menjadikan Negara Palestina sebagai negara yang merdeka dan terlepas dari pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Maka dari itu, sangat diwajibkan jika Palestina tampak kecewa atas keputusan beberapa negara Arab yang dianggap telah membelok dan tidak memprioritaskan lagi kepentingan Negara Palestina, serta dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian damai yang telah disepakati bersama oleh dunia Arab.

Wilayah Palestina yang semakin tergerus karena aneksasi Israel, membutuhkan dukungan dan solidaritas dari negara-negara Arab yang dapat berdampingan untuk memperjuangkan kemerdekaan

Negara Palestina. Palestina hanya membutuhkan dukungan penuh masyarakat internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah untuk memperoleh kekuatan sampai disepakatinya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

Adanya kongres yang mendukung kebijakan administrasi Trump untuk mempromosikan hubungan bilateral dan multilateral antara Israel dan negara-negara Arab dengan mendanai \$250 juta dalam pertukaran orang-ke-orang, membentuk kaukus kongres untuk memajukan hubungan ini, dan mempertimbangkan undang-undang untuk meningkatkan tekanan AS di forum internasional untuk mempromosikan hubungan diplomatik ini.³⁶

Sementara para pendukung kesepakatan ini merayakan pendalaman hubungan bilateral dan multilateral Israel-Arab, mereka mengabaikan untuk menyebutkan desain dan hasil Kesepakatan Abraham yang sangat bermasalah. Ini termasuk kebijakan administrasi Trump yang gagal dalam upaya memaksa warga Palestina untuk menyerahkan hak politik mereka dengan imbalan bujukan ekonomi; kebijakan yang berhasil mengisolasi rakyat Palestina secara diplomatik untuk memungkinkan Israel mengkonsolidasikan dan memperdalam pemerintahan apartheidnya dengan lebih baik; dan kesimpulan dari kesepakatan bisnis yang tidak pantas dengan rezim Arab otoriter yang telah melemahkan aktivis hak asasi manusia di kawasan itu, berpotensi memperdalam keterlibatan AS dalam melakukan kejahatan perang, merusak aspirasi untuk kebebasan dan penentuan nasib sendiri, dan transisi lemah yang rumit menuju demokrasi.

Tentu saja, semua orang menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Namun, perdamaian harus didasarkan pada keadilan dan pemenuhan hak-hak kebebasan dan penentuan nasib sendiri yang telah lama disangkal oleh rakyat Palestina. Kebijakan administrasi Trump yang dirancang untuk menghindari hak-hak Palestina, mengkonsolidasikan aturan apartheid Israel, dan memperkuat pemerintah otoriter di kawasan itu tidak akan membawa perdamaian, tetapi sebaliknya. Sebelum Anggota Kongres mengambil langkah lebih lanjut untuk menegaskan kembali kesepakatan administrasi Trump yang anti-demokrasi dan anti-hak asasi manusia ini, mereka harus berhenti melihat Kesepakatan Abraham sebagai barang murni dan lebih menyadari aspek-aspek yang lebih tidak menyenangkan dari kesepakatan ini.

Perjanjian Abraham berakar pada kebijakan administrasi Trump yang gagal dalam upaya memaksa warga Palestina untuk menyerahkan hak politik mereka dengan imbalan bujukan ekonomi yang mewah. Strategi ini dirancang oleh mantan penasihat Trump dan menantu laki-laki Jared Kushner dan dibangun di atas keyakinan Zionis ahwa rakyat Palestina akan menyetujui subordinasi mereka jika diberikan pembangunan ekonomi yang memadai. Pola pikir kolonial ini mendasari apa yang disebut konferensi Perdamaian untuk Kemakmuran Kushner yang diadakan di Bahrain pada Juni 2019. Kushner menyatakan bahwa "Sudah terlalu lama orang-orang Palestina terperangkap dalam kerangka masa lalu yang tidak efisien," sebuah referensi nyata untuk pencarian mereka akan kebebasan dan diri sendiri.³⁷

Alih-alih mendukung hak-hak politik rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, materi-materi promosi Perdamaian untuk kemakmuran pemerintahan Trump yang dipenuhi dengan janji terkait sekolah bisnis, melepaskan potensi ekonomi Palestina, dan menciptakan model baru dari pertumbuhan ekonomi serta investasi; tetapi di sisi lain mereka tetap bertahan terhadap hak politiknya. Untuk investasi \$50 miliar yang dijanjikan, orang-orang Palestina diharapkan untuk melepaskan hak-hak

³⁶ Institute for Middle East Understanding (IMEU), "Abraham Accords Isolate Palestinians, Solidify Israel's Apartheid Rule," 2022, <https://imeu.org/article/imeu-policy-analysis-5-abraham-accords-isolate-palestinians-solidify-israel>.

³⁷ (IMEU).

mereka dan puas dengan perbaikan ekonomi di bawah dominasi abadi Israel. Tidak heran jika Palestina memboikot konferensi Bahrain.³⁸

Rencana ini menjadi dasar dari rilis Januari 2020 yang secara luas disorot oleh pemerintahan Trump dari apa yang disebut visi politik dan ekonomi, serta perdamaian untuk kemakmuran untuk hubungan Palestina-Israel. Seperti dirangkum oleh *Congressional Research Service* (CRS), rencana tersebut akan mendukung pencaplokan 30 persen Tepi Barat oleh Israel, termasuk hampir semua permukiman Israel dan Lembah Yordan; orang-orang Palestina tidak akan diizinkan untuk menjalankan kedaulatan atas bagian mana pun dari Ibu Kota mereka di Yerusalem, kecuali untuk daerah-daerah di dalam batas-batas kotamadya yang diperluas yang terputus dari bagian kota lainnya oleh tembok ilegal Israel; Israel akan mempertahankan tingkat "kontrol keamanan" yang mencakup semua atas keseluruhan Tepi Barat; pengungsi Palestina akan ditolak hak-hak internasional mereka untuk repatriasi, dan status negara Palestina yang dipotong akan dibuat bersyarat dan dilaksanakan hanya setelah daftar tuntutan Israel dipenuhi.³⁹

Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu percaya bahwa rencana pemerintahan Trump memungkinkan dia untuk mencaplok tanah Palestina bahkan sebelum memasuki negosiasi. Sementara pemerintahan Trump secara internal terbagi atas rencana Netanyahu untuk mencaplok sebagian Tepi Barat, Uni Emirat Arab (UEA) yang mengusulkan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel dengan imbalan Israel membekukan sementara rencana pencaplokan *de jure*; namun, pencaplokan *de facto*, melalui penjajahan Israel yang sedang berlangsung dan perampasan Palestina, terus berlanjut, dan bahkan semakin intensif.⁴⁰

Kesepakatan pemerintahan Trump tidak hanya memperdalam keterlibatan AS dalam melakukan kejahatan perang, mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia, memperumit transisi demokrasi, dan merusak penentuan nasib sendiri; dengan desain, perjanjian ini juga dimaksudkan untuk secara politis mengisolasi rakyat Palestina dari hubungan solidaritas yang diungkapkan oleh orang-orang Arab. Isolasi rakyat Palestina ini, tentu memfasilitasi pendalaman rezim *apartheid* Israel yang terpisah dan tidak setara. Dalam pandangan pemerintahan Trump, Perjanjian Abraham dimaksudkan untuk memungkinkan Israel menikmati manfaat hubungan diplomatik dengan pemerintah Arab, sambil mempertahankan kekuasaan militernya atas warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sehingga, dapat dikatakan bahwa adanya Perjanjian Abraham tersebut untuk mengisolasi dan meminggirkan Palestina.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan unsur nilai (*values*) dalam menganalisis permasalahan ini. Pada dasarnya, sebuah persepsi ancaman merupakan hasil dari ciptaan atau bisa disebut sebagai kreasi para pembuat kebijakan. Dalam wilayah ini, konstruktivisme lahir sebagai alat untuk mengetahui bahwa setiap realitas yang berada di luar merupakan hasil konstruksi yang berasal dari pikiran manusia yang didasarkan pada nilai atau paradigma yang dianutnya. Persepsi ancaman yang terbentuk di Palestina merupakan dampak dari konstruksi dari kebijakan dan kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.⁴¹

Kesimpulan

³⁸ Jim Zanotti, "Israel and the Palestinians: U.S. Peace Plan and Possible Israeli Annexation" (Washington, D.C, USA: Congressional Research Service (CRS), 2020).

³⁹ Zanotti.

⁴⁰ Simela Victor Muhamad, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 17 (2020).

⁴¹ Asrudin Mirza Jaka Suryana, "Analisis Konstruktivisme Tentang Persepsi Ancaman," *Jurnal Global Dan Strategis* 7, no. 1 (2013): 119.

Dari penjabaran di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel didasarkan pada identitas (*identity*), kepentingan (*interest*), maksud (*intention*), dan nilai (*values*). Adanya hubungan persahabatan yang begitu erat antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dianggap memiliki satu kesamaan dan tujuan untuk dapat memberikan pengaruh di wilayah Timur Tengah, hal ini dapat dibuktikan dengan analisis maksud (*intention*) dalam politik mutualisme di antara keduanya.

Selain itu, terjadinya kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pun didasari oleh suatu kepentingan (*interest*) nasional negara yang bersangkutan. Seperti adanya kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan kepentingan-kepentingan lain yang menguntungkan. Keberpihakan AS, khususnya Donald Trump terhadap Israel pun disebabkan adanya unsur identitas (*identity*), di mana Trump berpihak kepada Negara Yahudi dalam beberapa kebijakan politik luar negerinya, salah satunya adalah keterlibatan Trump dalam kesepakatan normalisasi hubungan Israel, adanya klaim sepihak terhadap Yerusalem, serta keterlibatannya dalam isu-isu lain di wilayah Timur Tengah.

Kegencaran Trump dalam memediasi kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel dikarenakan Donald Trump sedang mencari dukungan kepada kaum Yahudi Amerika Serikat yang mendukung kebijakannya di Timur Tengah. Hal ini juga Trump lakukan untuk mengeksikasikan diri menjelang Pemilihan Presiden AS tahun 2020.

Bagi Palestina sendiri, adanya kesepakatan damai Negara UEA, Bahrain, Maroko, Sudan dengan Israel pada dekade ini, dapat melemahkan solidaritas negara-negara Arab yang sejak dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina agar terlepas dari pendudukan Israel. Oleh karena itu, pihak Palestina menganggap bahwa negara-negara Arab yang telah menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel sebagai pengkhianat perjuangan yang telah dibangun sejak dulu, hal ini berdasarkan analisis nilai (*values*) dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sadat. *Mencari Identitas*. Jakarta: Tira Pustaka Jakarta, 1983.
- Asseburg, Muriel, and Sarah Charlotte Henkel. "Normalisation and Realignment in the Middle East." Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 2021. <https://www.swp-berlin.org/en/publication/normalisation-and-realignment-in-the-middle-east>.
- CNN Indonesia. "Kronologi Normalisasi Hubungan UEA, Bahrain Dan Israel," September 16, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916085105-120-547021/kronologi-normalisasi-hubungan-uea-bahrain-dan-israel>.
- Dachtler, Petra. "From New to Normal: Two Years after the Abraham Accords," no. 5 (2022). <https://doi.org/10.57671/GFME-22052>.
- Friedrich Kratochwil. *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Hitman, Gadi, and Chen Kertcher. "The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict." *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies* 2 (2018). <https://doi.org/10.26351/JIMES2-13>.
- (IMEU), Institute for Middle East Understanding. "Abraham Accords Isolate Palestinians, Solidify Israel's Apartheid Rule," 2022. <https://imeu.org/article/imeu-policy-analysis-5-abraham-accords-isolate-palestinians-solidify-israel>.
- Iqbal Ramadhan. "Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah." *Journal Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (Mei 2017): 88–206.
- John O. Voll, John L. Esposito. *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek*. Bandung: Mizan, 1999.
- Juhana Nasrudin. "Politik Identitas Dan Representasi Politik." *Jurnal Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2018).
- Kirdi Dipoyudo. "Mesir Sesudah Presiden Anwar Sadat." *Jurnal Analisa: Aktualitas Internasional* 4, no. 9 (1982): 380.
- Koran Tempo. "Iran Dan Turki Kecam Normalisasi Hubungan UEA-Israel," Agustus 2020. <https://koran.tempo.co/read/internasional/456828/iran-dan-turki-kecam-normalisasi-hubungan-uea-israel>.
- Lene Hansen, Barry Buzan. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Lovell, J.P. *Foreign Policy in Perspective*. Canada: Holt, Rinehart & Winston, 1970.
- Lucas, Russell E. "Jordan: The Death of Normalization with Israel." *Middle East Journal* 58, no. 1 (2004).
- Massimiliano Fiore. "The Abraham Accords and the Palestinian Issue." *E-International Relations*, n.d. <https://www.e-ir.info/2020/11/01/the-abraham-accords-and-the-palestinian-issue/>.
- Mirza Jaka Suryana, Asrudin. "Analisis Konstruktivisme Tentang Persepsi Ancaman." *Jurnal Global Dan Strategis* 7, no. 1 (2013): 119.

- Muhamad, Simela Victor. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 17 (2020).
- Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani. "Pengaruh Serangan 9/11 Terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional." *Journal Andalas: Journal of International Studies* 5, no. 1 (2006): 29.
- Noam Chomsky. *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World*. London: Pluto Press, 2016.
- Paul Hare, David Naveh. "Group Development At Camp David Summit." *Journal Small Group Research* 15, no. 3 (Agustus 1984): 299.
- Purwono, Sugiarto Pramono. "Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional" 7, no. 2 (2010): 14.
- Republika. "AS Dan Israel Lobi Banyak Negara Arab Untuk Normalisasi," Oktober 2020. <https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/qifyei377/as-dan-israel-lobi-banyak-negara-arab-untuk-normalisasi>.
- . "Pemerintahan Trump Siap Jual Senjata Canggih AS Senilai Rp 14 Triliun Ke Maroko," 2020. <https://dunia.tempo.co/read/1413777/pemerintahan-trump-siap-jual-senjata-canggih-as-senilai-rp-14-triliun-ke-maroko>.
- Riza Sihbudi. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2007.
- R.P. Barston. *Modern Diplomacy*. London and New York: Routledge, 2013.
- Rudi Candra. "PENGARUH IDENTITAS PERSAHABATAN AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL TERHADAP PENOLAKAN KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB," April 2018. https://www.researchgate.net/publication/324770165_PENGARUH_IDENTITAS_PERSAHABATAN_AMERIKA_SERIKAT_DAN_ISRAEL_TERHADAP_PENOLAKAN_KEANGGOTAAN_PALESTINA_DI_PBB.
- S. Walt, J. Mearsheimer. *The Israel Lobby and U.S Foreign Policy*. New York: Farrar, Starus and Giroux, 2008.
- Simela Victoe Muhammad. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina." *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 17 (September 2020): 7–12.
- Sri Khairunnisa Ariyati. "Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat Dan Upaya Resolusi Konflik." *Jurnal Verity-UPH Journal of International Relations* 11, no. 22 (July 2019): 32.
- Tempo. "Normalisasi Dengan Israel Untungkan Bahrain Dalam Konflik Internal," September 14, 2020. <https://dunia.tempo.co/read/1385985/normalisasi-dengan-israel-untungan-bahrain-dalam-konflik-internal>.
- The Hashemite Kingdom of Jordan. "The Disaster of 1967," n.d. http://www.kinghussein.gov.jo/his_periods3.html.
- Yossef, Amr. "The Regional Impact of the Abraham Accords." West Point, New York: Modern War Institute, 2021.
- Zanotti, Jim. "Israel and the Palestinians: U.S. Peace Plan and Possible Israeli Annexation." Washington, D.C, USA: Congressional Research Service (CRS), 2020.